

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan bagian dalam menciptakan sistem yang *powershare* pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Desentralisasi kewenangan atau kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Pengambilan keputusan mengenai ekonomi, politik dan sosial diperlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan (Latifah dan Sabeni, 2017). Pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas.

Penyusunan laporan keuangan diperlukan suatu standar yang bertujuan agar pemahaman para pengguna dan pemahaman para penyusun laporan keuangan sama. Standar akuntansi merupakan aspek penting dalam profesi dan semua pemakai laporan keuangan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi pada periode tertentu. Oleh karena itu standar akuntansi yang berkualitaslah yang diharapkan oleh

profesi akuntansi dan pemakai laporan keuangan. Standar akuntansi yang berkualitas diharapkan mudah dipahami oleh pengguna (Amelia, 2014).

Standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah tidak sama dengan standar akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pos-pos penerimaan dan pengeluaran perusahaan dengan pos-pos penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah biasa disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar ini sering mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 238/PMK.05/2011 adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Oleh sebab itu penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menjadi salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi.

Pada organisasi pemerintah daerah, sistem akuntansi dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). OPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang digunakan pada saat sekarang ini adalah sistem akuntansi yang mengacu pada kebijakan perundangan yaitu Permendagri No. 13/2006 yang kemudian direvisi pada Permendagri No.59/2007 dan direvisi kembali pada Permendagri No.21/2011. Suatu keberhasilan penerapan sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan penerapan suatu sistem (Bodnar dan Hopwood: 2013). Agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD ini maka perlu adanya faktor perilaku dalam suatu organisasi yang mendukung dalam penerapan SAKD tersebut, diantaranya adanya kejelasan tujuan suatu organisasi serta adanya dukungan atasan dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat meningkatkan kegunaan SAKD tersebut dalam memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik, karena SAKD dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel (Latifah dan Sabeni, 2017)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan juga memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Instansi pemerintah mulai tahun 2015

harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu berbasis akrual. Lebih lanjut Anggota VBPK, Moermahadi Soerja Djanegara Dalam Sambutannya di Sidang Paripurna Penyerahan LHP BPK atas LKPD DIY TA 2015 menyampaikan bahwa : “Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka tahun 2015 merupakan tahun pertama pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, pemda dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban serta kekayaannya, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebihnya. Adanya LKPD berbasis akrual ini pemda telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah (bpk.go.id, 2016).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan Standar akuntansi pemerintahan akan dapat disusun laporan keuangan yang useful. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Namun, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual belum sepenuhnya efektif.

Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki tujuan yang sama dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan, Hal tersebut sama-sama bertujuan untuk meningkatkan opini audit yang semakin baik. Dikutip dari bpkad.pacitankab.go.id, Pemerintah Kabupaten Pacitan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Ditengah masa pandemi Covid 19 yang sedang mewabah tidak menurunkan semangat pemerintah bersama masyarakat dalam melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin. Hal ini dibuktikan oleh Kabupaten Pacitan yang sudah 9 kali dan 7 kali secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mampu dipertahankan oleh Kabupaten Pacitan sekaligus menunjukkan bahwa perlakuan standart akuntansi Kabupaten Pacitan sudah baik.

Perlakuan akuntansi yang baik oleh Kabupaten Pacitan tidak terlepas dari penerapan sistem akuntansi yang tepat. Keberhasilan dalam penerapan sistem akuntansi juga sangat bergantung dari perilaku individu dalam suatu organisasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa perilaku individu dalam Pemerintahan Kabupaten Pacitan yaitu pegawai dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dapat dikatakan baik. Hal ini terbukti dari mahirnya pegawai pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pacitan dalam menyelesaikan tugasnya. Pegawai begitu terampil dan sangat menguasai job desk mereka masing-masing. Hal ini terwujud berkat adanya dukungan dari atasan atas pelatihan-pelatihan yang telah mereka ikuti.

Penelitian serupa telah banyak dilakukan diantara penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Widodo (2017) yang menemukan bahwa pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Mranani dan Lestiorini (2011) menunjukkan hasil berbeda dimana keperilakuan organisasi yang diwakili oleh pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan tidak memiliki pengaruh terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Penelitian dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pacitan dengan alasan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana hasil apabila penelitian dilakukan berbeda dari tempat penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan, jika penelitian terdahulu menggunakan variabel keperilakuan organisasi sedangkan penelitian ini menggunakan variabel keperilakuan organisasi dan ditambah dengan penerapan standart akuntansi. Tempat dilakukannya penelitian dalam penelitian terdahulu di OPD kabupaten sleman sedangkan sekarang di OPD Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keperilakuan Organisasi Dan Penerapan Standart Akuntansi Keuangan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Pada Opd Kabupaten Pacitan).”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh berperilaku organisasi terhadap kegunaan system akuntansi keuangan daerah?
2. Bagaimana pengaruh penerapan standart akuntansi keuangan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
3. Bagaimana pengaruh berperilaku organisasi dan penerapan standart akuntansi keuangan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pengaruh berperilaku organisasi terhadap kegunaan system akuntansi keuangan daerah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standart akuntansi keuangan terhadap kegunaan system akuntansi keuangan daerah.

- c. Untuk mengetahui pengaruh keperilakuan organisasi dan penerapan standart akuntansi keuangan terhadap kegunaan system akuntansi keuangan daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi untuk bisa memberikan gambaran empiris dan menjadi bahan masukan mengenai variabel keperilakuan organisasi dan penerapan standart akuntansi keuangan terhadap kegunaan system akuntansi keuangan daerah.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, sebagai bekal yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja serta pengalaman berharga dalam konvergensi teori-teori ilmiah dengan fenomena di lapangan.

- c. Bagi Penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menambah wawasan sebagai referensi yang dapat dipergunakan untuk dasar penelitian selanjutnya.